



Harapkan Forum SPPA Kawal Hak Anak

KOTA, *Joglo Jogja* – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengukuhkan Forum Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), kemarin. Forum tersebut diharapkan dapat mengawal perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sejak awal proses hukum hingga anak kembali ke lingkungan sosial.

"Forum ini menjadi wadah koordinasi untuk memastikan pemenuhan hak bagi anak yang berhadapan

dengan hukum. Sejak proses awal, persidangan, hukuman, hingga reintegrasi ke lingkungan sosial," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Edy Muhammad, Selasa (22/11).

Forum SPPA Kota Yogyakarta terdiri dari berbagai instansi lintas sektor. Di antaranya sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD)

“ Forum ini menjadi wadah koordinasi untuk memastikan pemenuhan hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sejak proses awal, persidangan, hukuman, hingga reintegrasi ke lingkungan sosial.

Edy muhammad

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta

di lingkungan Pemkot Yogyakarta, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas DIY,

LPKA DIY, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY, Kantor Kementerian Agama

Kota Yogyakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban DIY, hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta.

Menurut Edy, sebelum forum tersebut dikukuhkan, Kota Yogyakarta tidak dapat memantau atau sulit melakukan intervensi terhadap anak berhadapan dengan hukum saat kembali ke lingkungan keluarga maupun ke lingkungan sosial.

■ Baca **HARAPAN...** Hal II



RESMIKAN: Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi saat mengukuhkan Forum SPPA Yogyakarta, Selasa (22/11).

Harapkan Forum SPPA Kawal Hak Anak

sambungan dari hal Joglo Jogja

"Hanya sedikit yang bisa kami pantau. Tetapi, dengan keberadaan forum ini maka diharapkan intervensi terhadap ABH yang selesai menjadi proses hukum bisa dilakukan lebih baik," katanya.

Selama menjalani proses

hukum sejak dari kepolisian, peradilan, hingga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Edy memastikan, anak juga mendapat pembinaan serta hak-hak mereka tetap terpenuhi. "Anak dan keluarga serta lingkungan

menjadi lebih siap. Harapannya, anak tetap bisa tumbuh dan berkembang dengan baik karena keluarga dan lingkungan mendukung," katanya.

Hingga saat ini, LPKA DIY membina 27 orang, 15 di antaranya masih berusia anak.

"Dari 15 anak tersebut, sekitar separuhnya adalah warga Kota Yogyakarta," kata Edy.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengatakan, pemerintah daerah memiliki komitmen untuk memberikan per-

indungan dan pemenuhan hak anak. "Komitmen ini harus bisa diwujudkan secara berkelanjutan, adil, dan tanpa diskriminasi karena kami ingin mencetak pemimpin-pemimpin muda dari Yogyakarta," katanya.

Salah satu pengakuan terhadap komitmen Kota Yogyakarta untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah predikat Kota Layak Anak kategori utama, yang disandang Yogyakarta dua kali ber-

turut-turut sejak tahun lalu. "Kami pun optimistis bisa naik kelas menjadi KLA paripurna. Oleh karenanya, perlindungan dan pemenuhan hak anak di segala bidang harus bisa dilakukan terus menerus," tandasnya. (ara/abd)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005